

**AFILIASI:**

^{1,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat

²Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat

***KORESPONDENSI:**

nurfitriani@unsulbar.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

[https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK](https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK)

DOI: [10.32534/jpk.v12i4.8034](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.8034)

CITATION:

Fitriani, N., Putra, R. A., & Basir, I. (2025). Pembiayaan hijau sebagai moderator: Literasi keuangan dan kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan UMKM. *Jurnal Proaksi*, 12(4), 834–851.

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

30 September 2025

Di Review:

16 Oktober 2025

Diterima:

22 Desember 2025

Pembiayaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan UMKM

Nur Fitriani¹, Ridha Anugerah Putra², Indra Basir³

Abstrak

Tujuan Utama - Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM serta peran pembiayaan hijau sebagai moderator di Sulawesi Barat.

Metode - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanatori dengan menggunakan pendekatan *structural equation modelling-partial least square* (SEM-PLS).

Temuan Utama - Meskipun pembiayaan hijau telah diimplementasikan secara nasional, pada tingkat daerah seperti Provinsi Sulawesi Barat kebijakan tersebut belum diturunkan menjadi pedoman operasional dan produk yang aplikatif bagi pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan indikator akses dan kemudahan memiliki persebaran rendah (range restriction), sehingga efek langsung maupun efek moderasi tidak terdeteksi secara statistik dan pengaruh pembiayaan hijau terhadap keberlanjutan UMKM belum teridentifikasi secara empiris.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Hasil penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan literasi keuangan pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha berkelanjutan. Kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada prosedur yang sederhana dan insentif yang mudah diakses, sedangkan penerapan pembiayaan hijau di daerah perlu dipercepat melalui pengembangan produk adaptif dan pendampingan agar kontribusinya terhadap keberlanjutan UMKM dapat terukur.

Kebaruan Penelitian - Kebaruan penelitian ini adalah kebijakan keuangan hijau untuk keberlanjutan UMKM hijau pada daerah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Barat yang ditinjau dari hubungan pengaruh antar variabel yang berkaitan dengan penelitian.

Kata Kunci: UMKM, literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiayaan hijau, keberlanjutan.

Abstract

Main Purpose - The objectives of this study are to examine financial literacy and government policies on the sustainability of MSMEs and the role of green financing as a moderator in West Sulawesi.

Method - The research method used quantitative explanatory using a structural equation modelling-partial least square (SEM-PLS) approach.

Main Findings - Although green financing has been implemented nationally, at the regional level, such as in West Sulawesi Province, the policy has not been translated into operational guidelines and applicable products for MSME actors. This condition has resulted in low indicators of access and ease of distribution (range restriction), so that direct and moderating effects are not statistically detectable, and the impact of green financing on MSME sustainability has not been empirically identified.

Theory and Practical Implications - The results of the study imply the need to strengthen the financial literacy of MSME actors in sustainable business management. Government policies need to focus on simple procedures and easily accessible incentives, while the implementation of green financing in the regions needs to be accelerated through the development of adaptive products and assistance so that its contribution to the sustainability of MSMEs can be measured.

Novelty - The novelty of this research is green finance policies for sustainability of green MSMEs in emerging regions such as Province of West Sulawesi in terms of the relationship between the variables related to this research.

Keywords: MSMEs, Financial Literacy, Government Policy, Green Finance, Sustainability.

PENDAHULUAN

Saat ini, masalah lingkungan menjadi salah satu hambatan untuk pertumbuhan berkelanjutan pada suatu negara di tengah tantangan perubahan iklim dan kelangkaan energi (Zhang & Cheung, 2025). Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengadopsi strategi *Net Zero Emission* untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2050. Beberapa negara maju telah mengimplementasikan kebijakan dan regulasi ketat untuk mengurangi emisi karbon. Perusahaan multinasional juga mulai mengadopsi prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam operasional bisnisnya untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing global (Elliott & Setyowati, 2020).

Konsep keberlanjutan menjadi perhatian utama saat ini dalam berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan ESG salah satunya melalui UMKM dengan memberikan kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, serta skema pembiayaan hijau yang difasilitasi oleh Lembaga keuangan nasional maupun internasional (Rusmanah et.al, 2024). Perwujudan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebijakan ekonomi hijau telah mulai diterapkan dalam berbagai sektor bisnis (Hadi et al., 2024) . Namun, pada sektor UMKM masih terbatas dalam mengakses pendanaan hijau karena kurangnya pemahaman dan kesiapan teknologi yang mendukung keberlanjutan (Aghelie, 2017; Peña, 2020).

Sektor UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan. Sekitar 64,2 juta UMKM yang memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional (Judijanto et.al, 2024). Indonesia memiliki keragaman wilayah dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayahnya. Setiap daerah memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal. Khususnya pada Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian dan perikanan, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada perkebunan kakao dan kelapa serta usaha perikanan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM berbasis pertanian dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong potensi UMKM di Sulawesi Barat.

Secara nasional, beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan hijau dengan memberikan insentif kepada UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Lembaga keuangan perbankan juga telah meluncurkan skema pembiayaan hijau untuk mendorong UMKM bertransformasi menuju bisnis ramah lingkungan, meskipun implementasinya masih bertahap di tingkat daerah. Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah dengan unit usaha yang didominasi oleh UMKM, secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Irawati et al., 2024). Akan tetapi, tantangan perubahan iklim dan tekanan global terhadap pembangunan berkelanjutan menyebabkan UMKM harus beradaptasi dengan praktik bisnis yang ramah lingkungan (Basir et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan menjadikan pengimplementasian program pembiayaan hijau di tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Barat, berjalan tidak optimal (Agustin & Ibrahim, 2024; Reniati & Faisal, 2024).

Penelitian mengenai pembiayaan hijau untuk UMKM telah banyak dikaji dalam berbagai konteks, terutama dalam hal implementasi keuangan berkelanjutan dan aksesibilitas keuangan hijau. Adopsi pembiayaan hijau di kalangan UMKM masih rendah akibat dari keterbatasan literasi keuangan dan ketatnya regulasi perbankan (OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021, 2021). Di sisi lain, lembaga keuangan perbankan masih lebih memprioritaskan sektor korporasi dalam skema pembiayaan hijau, sehingga UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan berbasis berkelanjutan. Penelitian empiris mengenai peran pembiayaan hijau sebagai moderator hubungan literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM di tingkat daerah masih terbatas, sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam untuk mengisi celah tersebut.

Fitriani, Putra, Basir

Pembiayaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan UMKM

Model moderasi dipilih karena peran pembiayaan hijau sebagai faktor eksternal yang mempegaruhi besarnya dan arah efek literasi keuangan, serta kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM, sehingga pendekatan moderasi lebih relevan untuk menjawab kondisi dan tantangan riil di Sulawesi Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Resource-Based View* (RBV)

Teori *Resource-Based View* (RBV) pertama kali dikemukakan oleh (Wernerfelt, 1984) dan dikembangkan lebih lanjut oleh (Barney, 1991). *Resource-Based View* (RBV) adalah teori dalam manajemen strategis yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif dan keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Sumber daya ini bisa berupa aset berwujud (*tangible*) seperti modal, mesin, dan bangunan, maupun aset tak berwujud (*intangible*) seperti pengetahuan, keterampilan, reputasi, dan budaya organisasi. Pada konteks UMKM, literasi keuangan merupakan asset tak berwujud yang sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, inovasi, serta pengembangan strategi bisnis ramah lingkungan (Dwyanti, 2024). Oleh karena itu, agar sumber daya dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sumber daya tersebut harus memenuhi empat kriteria utama, yakni *valuable* (bernilai), *rare* (langka), *inimitable* (sulit ditiru), dan *non-susbtituable* (tidak dapat digantikan) (Tarumingkeng, 2024) agar mampu menciptakan keberlanjutan dan keunggulan bersaing bagi UMKM, termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan hijau.

Teori Triple Bottom Line

Teori *triple bottom line* diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997, dimana dasar dari ini adalah tentang keseimbangan *people*, *planet*, dan *profit* (3P). Konsep *triple bottom line* menunjukkan bahwa *stakeholder* merupakan kepentingan utama dari suatu perusahaan yang menjadi dasar ukuran untuk menilai kesuksesan perusahaan (Arslan & Kisacik, 2017). Hal ini dilakukan agar perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya tidak hanya berfokus pada profit, akan tetapi juga turut serta untuk peduli terhadap lingkungan dan social (Elkington, 1997).

Dalam konteks penelitian ini, teori *Triple Bottom Line* dioperasionalkan melalui pendekatan yang melihat keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai hasil dari integrasi antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Literasi keuangan berperan dalam memperkuat dimensi ekonomi melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien. Kebijakan pemerintah mencerminkan dimensi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan pelaku usaha dan penciptaan iklim usaha yang inklusif. Sementara itu, pembiayaan hijau menggambarkan dimensi lingkungan yang mendorong praktik usaha ramah lingkungan melalui penyediaan instrumen keuangan yang berkelanjutan. Teori *Triple Bottom Line* menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini untuk menjelaskan keberlanjutan UMKM di daerah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Barat, di mana keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan usaha yang berkelanjutan.

Pembiayaan Hijau

Pembiayaan hijau (*green financing*) merupakan layanan keuangan yang dirancang untuk mendukung investasi atau pemberian pembiayaan kepada proyek, kegiatan, atau usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Haktanır Aktaş & Kahraman, 2024). Tujuan utama pembiayaan hijau ialah mendorong perubahan sistemik menuju ekonomi rendah karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem alam (Roy, 2025). Negara Indonesia mulai mengadopsi pembiayaan hijau melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti penerbitan *green bond*, *roadmap* keuangan berkelanjutan oleh OJK, dan insentif

fiskal untuk proyek hijau. Namun, tantangan utama implementasi pembiayaan hijau adalah keterbatasan literasi keuangan hijau, biaya awal yang tinggi, dan belum meratanya akses ke produk keuangan hijau ([Otoritas Jasa Keuangan, 2024](#)).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan ([Rama et al., 2025](#)). Literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, penganggaran, investasi, serta pengelolaan risiko keuangan yang mendorong individu mengambil keputusan rasional dalam mengelola sumber daya keuangannya ([Patil, 2024](#)).

Secara teoretis, literasi keuangan berakar pada *Financial Behavior Theory* dan *Human Capital Theory*, yang menekankan bahwa perilaku dan keputusan keuangan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keyakinan individu terhadap sistem keuangan. Dalam konteks pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi keuangan menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan usaha bertahan dan berkembang. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan baik mampu mengelola arus kas, memanfaatkan sumber pembiayaan formal secara efektif, dan beradaptasi terhadap inovasi keuangan, termasuk pembiayaan hijau yang mendukung praktik usaha berkelanjutan ([Ardi Armen et al., 2023](#)).

HIPOTESIS

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk mengelola keuangan secara efektif, mengambil keputusan yang rasional, serta menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang. Menurut *Financial Behavior Theory*, perilaku keuangan individu terbentuk dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya finansial. Seseorang dengan literasi keuangan tinggi lebih mampu merencanakan pengeluaran, mengelola arus kas, dan memanfaatkan sumber pembiayaan secara optimal ([Lusardi & Mitchell, 2014](#)).

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Penelitian ([Jeandry & Malik, 2024](#)) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Temuan serupa dikemukakan oleh ([Burchi et al., 2021](#)), bahwa kemampuan pelaku usaha dalam memahami instrumen keuangan mendorong efisiensi dan ketahanan ekonomi bisnis jangka panjang. Literasi keuangan juga membantu pelaku usaha lebih adaptif terhadap inovasi pembiayaan baru seperti pembiayaan hijau yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan.

H2: Kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi keberlanjutan UMKM. Berdasarkan *Institutional Theory*, keberlanjutan organisasi sangat dipengaruhi oleh tekanan regulatif, normatif, dan koersif dari institusi formal seperti pemerintah ([DiMaggio, P. J., & Powell, 1983](#)). Pemerintah dapat memperkuat keberlanjutan UMKM melalui kebijakan yang mendukung akses pembiayaan, pelatihan, serta insentif usaha berorientasi lingkungan. Kebijakan yang terarah juga dapat mendorong perilaku usaha yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah ([Elkington, 1997](#)). Penelitian ([Kristiawati et al., 2024](#)) mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM, meskipun dampaknya belum signifikan apabila tidak diiringi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengoptimalkan kebijakan yang ada. Hasil tersebut menegaskan

bahwa efektivitas kebijakan pemerintah masih bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan program dan insentif yang diberikan.

H3: Pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Pembiayaan hijau (*green financing*) merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa penelitian menegaskan hubungan positif antara pembiayaan hijau dan keberlanjutan usaha seperti ([Xu et al., 2025](#)) menemukan bahwa kebijakan pembiayaan hijau mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat ketahanan bisnis di negara berkembang. Selanjutnya ([Appiah-Kubi et al., 2024](#)) juga menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan UMKM melalui peningkatan efisiensi operasional dan pelaporan keberlanjutan yang lebih baik.

H4: Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

Pembiayaan hijau dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan *Contingency Theory* ([Donaldson, 2001](#)), efektivitas pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung seperti akses pembiayaan hijau. Skema keuangan hijau memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan tinggi untuk mengoptimalkan keputusan finansialnya dalam praktik bisnis berkelanjutan, seperti investasi pada efisiensi energi dan inovasi ramah lingkungan.

Penelitian ([Appiah-Kubi et al., 2024](#)) menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berperan penting dalam meningkatkan praktik keberlanjutan UMKM. Selanjutnya ([Azalia & Muharam, 2025](#)) menegaskan bahwa literasi keuangan yang rendah sering kali menjadi kendala dalam pemanfaatan pembiayaan hijau, sementara ([Molina-García et al., 2025](#)) menemukan bahwa literasi keuangan yang baik mendorong inovasi dan efisiensi lingkungan. Dengan demikian, pembiayaan hijau berfungsi sebagai moderator yang memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

H5: Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM.

Pembiayaan hijau dapat memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Berdasarkan *Institutional Theory* ([DiMaggio, P. J., & Powell, 1983](#)), keberlanjutan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang disertai akses pembiayaan hijau mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan mempercepat transisi pelaku UMKM menuju praktik bisnis berkelanjutan.

Penelitian ([Xu et al., 2025](#)) menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan keuangan hijau dan regulasi publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di negara berkembang. Kemudian ([Appiah-Kubi et al., 2024](#)) juga menemukan bahwa dukungan kebijakan yang diintegrasikan dengan pembiayaan hijau mampu memperkuat praktik keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Sementara itu, ([Kristiawati et al., 2024](#)) menekankan bahwa dukungan pemerintah akan lebih efektif apabila disertai skema pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan hijau berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *structural equation modelling – partial least square* (SEM-PLS). Pendekatan ini dilakukan untuk menguji hubungan literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian ditetapkan di tiga kabupaten representatif di Sulawesi Barat, yakni Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 27.982 unit usaha ([Badan Pusat Statistik, 2024](#)). Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat *error* sebesar 10%, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N \times e^2} = \frac{27.982}{1+27.982 \times 0,1^2} = 99,6 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh informasi tentang beberapa aspek yakni literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiasaan hijau, dan keberlanjutan UMKM. Semua item diukur dengan skala likert 1-5 (sangat tidak setuju - sangat setuju). Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (*pilot test*). Adaptasi instrumen kuesioner telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden lokal dan sesuai dengan konteks serta isu dalam penelitian.

HASIL

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software smartPLS* untuk menguji model konstruk dari variabel penelitian secara bersamaan. Hasil uji data penelitian dilampirkan sebagai berikut:

Tabel 1. Demografi Responden

Kriteria	Frekuensi	%
Jenis kelamin		
Laki-laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Usia responden		
< 25 tahun	8	8%
26-35 tahun	27	27%
36-45 tahun	34	34%
> 45 tahun	31	31%
Pendidikan terakhir		
SMP/sederajat	10	10%
SMA/sederajat	44	44%
Diploma / Sarjana	39	39%
Pascasarjana	7	7%
Lama menjalankan usaha		
< 3 tahun	18	18%
3-5 tahun	30	30%
6-10 tahun	32	32%
> 10 tahun	20	20%
Jenis usaha		
Perdagangan	36	36%
Kuliner	27	27%
Jasa	21	21%
Pertanian/Perikanan	16	16%

Lokasi Usaha		30	30%
Majene		30	30%
Polewali Mandar		35	35%
Mamuju		35	35%

Sumber: data diolah penulis, 2025.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Construct	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Literasi Keuangan				
FL 1	2	5	3,98	0,66
FL 2	2	5	3,94	0,62
FL 3	3	5	4,00	0,58
FL 4	2	5	3,95	0,59
Kebijakan Pemerintah				
GP 1	2	5	3,71	0,69
GP 2	2	5	3,67	0,72
GP 3	2	5	3,64	0,77
GP 4	2	5	3,69	0,75
Pembiasaan Hijau				
GF 1	1	5	2,49	0,84
	1	5	2,56	0,87
GF 3	1	5	2,58	0,81
Keberlanjutan UMKM				
SS 1	2	5	3,91	0,64
SS 2	2	5	3,86	0,71
SS 3	2	5	3,79	0,66
SS 4	3	5	3,97	0,68

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 3. Uji Validitas Konvergen (outer loading)

Construct	Literasi Keuangan (FL)	Kebijakan Pemerintah (GP)	Pembiasaan Hijau (GF)	Keberlanjutan UMKM (SS)
FL1	0,837			
FL2	0,815			
FL3	0,786			
FL4	0,810			
GP1		0,885		
GP2		0,877		
GP3		0,852		
GP4		0,831		
GF1			0,893	
GF2			0,869	

Fitriani, Putra, Basir

Pembiayaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan
UMKM

GF3	0,878
SS1	0,901
SS2	0,862
SS3	0,840
SS4	0,825

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada table 3 diatas menunjukkan bahwa semua indikator untuk masing-masing variabel literasi keuangan (FL), kebijakan pemerintah (GP), pembiayaan hijau (GF), dan keberlanjutan UMKM (SS) telah memenuhi syarat validitas konvergen dengan nilai *outer loading* $\geq 0,5$ untuk setiap indikator. Hasil ini menginterpretasikan bahwa semua indicator mampu menjelaskan latennya dengan baik.

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Literasi keuangan (FL)	0,658
Kebijakan pemerintah (GP)	0,733
Pembiayaan hijau (GF)	0,731
Keberlanjutan UMKM (SS)	0,66

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada tabel 4 diatas dapat interpretasikan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* menunjukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh indikator literasi keuangan yaitu sebesar 0,658. Nilai AVE untuk variabel kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh variabel kebijakan pemerintah yaitu sebesar 0,733. Nilai AVE untuk variabel pembiayaan hijau menunjukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh variabel pembiayaan hijau yaitu sebesar 0,731. Nilai AVE untuk variabel keberlanjutan UMKM menunjukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh variabel keberlanjutan UMKM yaitu sebesar 0,66.

Tabel 5. Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker)

Construct	(1)	(2)	(3)	(4)
Literasi Keuangan	0,811			
Kebijakan Pemerintah	0,524	0,856		
Pembiayaan Hijau	0,498	0,537	0,855	
Keberlanjutan UMKM	0,481	0,512	0,441	0,812

Sumber: output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada tabel 5 diatas untuk uji validitas diskriminan Fornell-Larcker menginterpretasikan bahwa nilai diagonal pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik .

Tabel 6. Hasil uji validitas diskriminan (Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT)

Construct	HTMT
Literasi Keuangan ↔ Kebijakan Pemerintah	0,612
Literasi Keuangan ↔ Pembiasaan Hijau	0,585
Literasi Keuangan ↔ Keberlanjutan UMKM	0,574
Kebijakan Pemerintah ↔ Pembiasaan Hijau	0,632
Kebijakan Pemerintah ↔ Keberlanjutan UMKM	0,643
Pembiasaan Hijau ↔ Keberlanjutan UMKM	0,598

Sumber: output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT < 0,85, sehingga setiap konstruk memenuhi validitas diskriminan. Berarti bahwa, keempat variabel penelitian mengukur konsep yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk.

Tabel 7. Nilai composite reliability dan Cronbach's Alpha

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Literasi keuangan (FL)	0,88	0,818
Kebijakan pemerintah (GP)	0,92	0,884
Pembiasaan hijau (GF)	0,911	0,854
Keberlanjutan UMKM (SS)	0,917	0,880

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiasaan hijau, dan keberlanjutan UMKM telah memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* $\geq 0,70$ sehingga dapat dinyatakan valid. Hasil tersebut menginterpretasikan bahwa variabel literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiasaan hijau, dan keberlanjutan UMKM memiliki konsistensi atau keakuratan pada indikator dalam mengukur suatu variabel.

Tabel 8. Nilai Uji R-square (R²)

	R ²
Keberlanjutan UMKM (SS)	0,094

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai R² untuk variabel keberlanjutan UMKM sebesar 0,094 yang menginterpretasikan bahwa hanya sekitar 9,4% variasi keberlanjutan UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiasaan hijau, serta interaksi moderasi. Secara statistik, nilai tersebut termasuk kategori sangat lemah, karena rendahnya variabilitas data pada variabel pembiasaan hijau yang belum terimplementasi secara nyata di Sulawesi Barat, sehingga kontribusinya terhadap keberlanjutan UMKM belum muncul secara empiris. Secara empiris, keberlanjutan UMKM di daerah masih lebih banyak ditentukan oleh faktor internal seperti literasi keuangan dan pengalaman usaha, sementara dukungan kebijakan dan akses pembiasaan hijau belum berfungsi secara optimal.

Tabel 9. Nilai (path coefficients)

Path	Coefficient (β)	tstatistik	p-value	Keputusan
Intercept	-0,002	0,031	0,976	
FL → SS	0,288	3,96	0,001	Diterima
GP → SS	0,139	2,443	0,015	Diterima
GF → SS	-0,047	0,754	0,451	Ditolak
FLxGF → SS	-0,098	0,975	0,33	Ditolak
GPxGF → SS	0,056	0,752	0,452	Ditolak

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antar variabel literasi keuangan (FL) terhadap keberlanjutan UMKM (SS) menunjukkan nilai β sebesar 0,288, nilai t sebesar 3,96; dan nilai p value <0,001 yang berarti bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Pada variabel kebijakan pemerintah (GP) terhadap keberlanjutan UMKM (SS) menunjukkan nilai β sebesar 0,139, nilai t sebesar 2,44; dan nilai p value sebesar 0,015 yang berarti bahwa variabel kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Pada variabel pembiayaan hijau terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan nilai β sebesar -0,047, nilai t sebesar 0,75; dan nilai p value sebesar 0,451 yang berarti bahwa variabel pembiayaan hijau berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.

Pada variabel literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau menunjukkan nilai β sebesar -0,098, nilai t sebesar 0,975 dan nilai p value 0,33 yang berarti bahwa variabel literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Pada variabel kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau menunjukkan nilai β sebesar 0,056, nilai t sebesar 0,752 dan nilai p value sebesar 0,452 yang berarti bahwa variabel kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau berpengaruh positif dan tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola keuangan, semakin besar peluang mereka untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Temuan ini mendukung *Financial Behavior Theory*, yang menjelaskan bahwa perilaku keuangan individu terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola sumber daya finansial (Lusardi & Mitchell, 2014). Dengan literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM mampu merencanakan pengeluaran, mengelola arus kas, serta memanfaatkan sumber pembiayaan secara efisien untuk menjaga stabilitas usahanya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi (Rinaldo, 2024) (Anisa Salsabila Kemala Fikri & Nahda, 2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. (Burchi et al., 2021) juga menegaskan bahwa kemampuan memahami instrumen keuangan mendorong efisiensi serta ketahanan ekonomi bisnis jangka panjang. Hasil ini diperkuat oleh (Edward et al., 2024) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan tinggi lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan kondisi pasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa literasi keuangan merupakan bentuk

human capital yang penting dalam meningkatkan kapasitas adaptif dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

Namun, temuan ini sedikit berbeda dengan penelitian (Kristiawati et al., 2024; Ulianti & Purbadharmaja, 2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha apabila tidak disertai dukungan pemerintah dan orientasi pasar. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari konteks penelitian yang berbeda; penelitian Kristiawati et al., 2024 menekankan pengaruh eksternal kebijakan dan lingkungan usaha, sementara penelitian ini menitikberatkan pada literasi keuangan sebagai faktor internal utama yang mendorong keberlanjutan UMKM.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menguatkan teori Resource-Based View (RBV), menjelaskan bahwa literasi keuangan sebagai asset tak berwujud pada UMKM yang sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang . Selain itu juga memperkuat teori *Financial Behavior Theory* dan *Human Capital Theory*, di mana pengetahuan dan keterampilan keuangan menjadi dasar terbentuknya perilaku pengambilan keputusan yang efektif dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, literasi keuangan terbukti sebagai faktor krusial dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, khususnya di daerah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Barat, di mana pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi usaha (Mohammad Chadir et al., 2025; Sumastuti et al., 2024).

Pengaruh Kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan UMKM untuk bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Kebijakan berupa pelatihan, pendampingan, insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan mampu meningkatkan efisiensi usaha serta daya saing pelaku UMKM. Temuan ini mendukung *Institutional Theory* (DiMaggio, P. J., & Powell, 1983), yang menjelaskan bahwa organisasi cenderung menyesuaikan perilakunya terhadap tekanan regulatif dan normatif dari institusi formal seperti pemerintah agar memperoleh legitimasi dan keberlanjutan usaha.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Ramadhona et al., 2023) dan (Arjawa et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan kondusif bagi pengembangan UMKM di negara berkembang. Hasil ini juga didukung oleh (Kristiawati et al., 2024), yang menekankan bahwa dukungan pemerintah memiliki kontribusi penting terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia, terutama melalui kebijakan pemberdayaan dan fasilitasi akses ekonomi. Temuan ini memperkuat konsep *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997), di mana intervensi kebijakan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan lingkungan dalam praktik usaha berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui *Resource-Based View* (RBV), yang menegaskan bahwa keunggulan dan keberlanjutan organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengakses dan mengelola sumber daya yang bernilai, langka, dan sulit ditiru (Barney, 1991). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai katalis yang menyediakan akses terhadap sumber daya strategis seperti informasi, teknologi, dan pembiayaan, yang memperkuat kemampuan UMKM dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Kebijakan pemerintah Indonesia kini semakin menekankan pentingnya pembiayaan hijau (*green financing*) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan UMKM (Kumar et al., 2022). Pembiayaan hijau adalah skema pendanaan yang diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon (Meilandri et al., 2025). Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam pembiayaan hijau memperkuat keberlanjutan UMKM dengan memberikan akses modal ramah lingkungan, insentif, dan pendampingan (Hamid & E Ahmed, 2024; Kusumawardhani et al., 2023).

Fitriani, Putra, Basir

Pembiayaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan UMKM

Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan UMKM berperan aktif dalam transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Pengaruh Pembiayaan hijau terhadap keberlanjutan UMKM.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan hijau belum mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan skema pembiayaan hijau belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di tingkat daerah. Berdasarkan *Triple Bottom Line Theory* (Elkington, 1997), pembiayaan hijau seharusnya mendorong tercapainya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui dukungan pendanaan bagi praktik usaha ramah lingkungan. Namun, pada konteks daerah berkembang seperti Sulawesi Barat, konsep pembiayaan hijau masih bersifat normatif lebih banyak dikenalkan di tataran kebijakan nasional dibandingkan penerapan praktis di sektor UMKM (Kumar et al., 2022), serta kebijakan pembiayaan hijau dominan pada sektor industri berskala besar (Raji, 2024), sehingga pengaruhnya terhadap keberlanjutan UMKM usaha menjadi lemah.

Dari sudut pandang *Resource-Based View (RBV)* (Barney, 1991), pembiayaan hijau dapat dikategorikan sebagai sumber daya eksternal yang bernilai tinggi karena mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi tersebut belum terealisasi secara optimal. Akses terhadap pembiayaan hijau masih terbatas, belum tersosialisasi secara luas, dan belum diintegrasikan dengan kebutuhan modal pelaku UMKM. Akibatnya, pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang tidak dapat mengonversi kebijakan pembiayaan hijau menjadi kekuatan strategis dalam menjaga kelangsungan usahanya. Hal ini menjelaskan arah hubungan negatif yang ditemukan bahwa pembiayaan hijau justru belum berfungsi sebagai faktor pendorong, melainkan menjadi bentuk kebijakan yang belum mampu diakses secara nyata oleh pelaku usaha.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Appiah-Kubi et al., 2024) dan (Xu et al., 2025), yang menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berkontribusi positif terhadap kinerja keberlanjutan UMKM di negara dengan dukungan kelembagaan yang kuat. Namun, hasil ini konsisten dengan (Ali et al., 2024), yang menemukan daerah berkembang, implementasi pembiayaan hijau belum signifikan karena rendahnya kapasitas lembaga keuangan dan minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha kecil. Dengan demikian, pembiayaan hijau memiliki potensi besar untuk memperkuat keberlanjutan UMKM, tetapi pada tahap saat ini, implementasinya masih bersifat simbolik dan belum memberikan dampak ekonomi yang nyata di tingkat daerah seperti Provinsi Sulawesi Barat.

Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan hijau tidak memperkuat, bahkan cenderung melemahkan pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Arah hubungan yang negatif ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha memiliki kemampuan keuangan yang baik, belum tentu mereka mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan hijau secara optimal. Berdasarkan *Contingency Theory* (Donaldson, 2001), hubungan antarvariabel dapat menjadi tidak efektif apabila kondisi kontekstual yang mendukung belum tersedia. Dalam konteks ini, ketiadaan instrumen pembiayaan hijau yang jelas, sosialisasi yang minim, serta rendahnya kesiapan lembaga keuangan di daerah menyebabkan literasi keuangan tidak dapat dikonversi menjadi tindakan keuangan berkelanjutan. Dengan kata lain, pembiayaan hijau belum berfungsi sebagai *enabling factor*, melainkan menjadi *constraint* karena belum terintegrasi dengan kapasitas dan kebutuhan riil pelaku UMKM.

Dari perspektif *Resource-Based View (RBV)* (Barney, 1991), pembiayaan hijau seharusnya menjadi sumber daya eksternal yang bernilai dan sulit ditiru, yang dapat memperkuat keunggulan kompetitif pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, sumber daya ini belum memenuhi empat karakteristik utama RBV (*valuable, rare, inimitable, and organized*). Di Sulawesi Barat, kebijakan

pembiayaan hijau masih berorientasi nasional dan belum diturunkan menjadi skema yang aplikatif di tingkat daerah. Akibatnya, pelaku UMKM dengan literasi keuangan tinggi justru dihadapkan pada situasi paradoks: mereka memahami pentingnya pembiayaan berkelanjutan, tetapi tidak memiliki akses nyata terhadap produk keuangan hijau. Kondisi inilah yang dapat menjelaskan arah koefisien negatif—semakin tinggi pemahaman keuangan pelaku UMKM, semakin mereka menyadari keterbatasan dan hambatan akses terhadap pembiayaan hijau, sehingga efek sinerginya melemah.

Hasil ini berbeda dengan temuan (Appiah-Kubi et al., 2024) dan (Molina-García et al., 2025) yang menemukan efek moderasi positif di konteks negara dengan ekosistem keuangan hijau yang matang. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ali et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pada negara berkembang, rendahnya ketersediaan produk pembiayaan hijau, lemahnya dukungan regulatif, dan minimnya literasi tentang konsep keuangan hijau menyebabkan efek moderasi tidak signifikan atau bahkan negatif. Dengan demikian, arah hubungan negatif ini mencerminkan kondisi transisi kebijakan: pembiayaan hijau masih berada pada tahap awal implementasi, sehingga belum mampu berfungsi sebagai katalis antara kemampuan keuangan dan keberlanjutan UMKM.

Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM.

Sinergi antara kebijakan pemerintah dan pembiayaan hijau menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, arah hubungan yang positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa pembiayaan hijau belum berfungsi optimal sebagai penguatan efektivitas kebijakan publik terhadap keberlanjutan usaha. Berdasarkan *Institutional Theory* (DiMaggio, P. J., & Powell, 1983), keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada dukungan regulatif, normatif, dan kognitif dari berbagai lembaga. Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional, tetapi implementasinya di daerah seperti Sulawesi Barat masih terbatas pada tataran konseptual. Hal ini menyebabkan pembiayaan hijau belum sepenuhnya berperan sebagai mekanisme penguatan dari kebijakan yang telah dirancang.

Dari perspektif *Resource-Based View* (Barney, 1991), pembiayaan hijau dan kebijakan publik dapat dianggap sebagai sumber daya eksternal yang bernilai tinggi apabila mampu dikelola secara sinergis. Namun, ketika infrastruktur kebijakan dan kapasitas lembaga keuangan hijau belum matang, sumber daya tersebut belum dapat dikonversi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penelitian (Xu et al., 2025) menegaskan bahwa hubungan kebijakan keuangan hijau dan keberlanjutan ekonomi hanya akan signifikan jika disertai kesiapan institusi finansial dan dukungan regulatif yang kuat. Temuan ini didukung oleh (Appiah-Kubi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan hijau bergantung pada kolaborasi kebijakan lintas sektor yang memfasilitasi adopsi praktik keberlanjutan oleh pelaku UMKM.

Selain itu, penelitian (Azalia & Muharam, 2025) mengemukakan bahwa kebijakan publik yang tidak terintegrasi dengan sistem pembiayaan ramah lingkungan cenderung menghasilkan efek kebijakan yang lemah terhadap sektor usaha kecil. Penelitian oleh (Ilahi et al., 2024) juga menemukan bahwa efek moderasi pembiayaan hanya akan akan memperkuat jika ekosistem, edukasi, dan insentif sudah tersedia dan dimanfaatkan secara luas. Dengan demikian, arah hubungan yang positif namun tidak signifikan ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah memang telah berorientasi pada keberlanjutan, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh instrumen keuangan hijau yang mampu menguatkan dampak kebijakan secara nyata di tingkat pelaku usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Literasi keuangan terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan daya tahan usaha, sementara

kebijakan pemerintah memberikan dukungan positif melalui regulasi dan insentif pemberdayaan. Namun, pembiayaan hijau yang diharapkan berfungsi sebagai pendorong keberlanjutan masih belum memberikan dampak yang kuat, baik sebagai variabel independen maupun sebagai moderator, karena penerapannya masih terbatas dan belum menjangkau pelaku usaha kecil di tingkat lokal. Secara teoretis, temuan ini memperkuat *Financial Behavior Theory*, *Institutional Theory*, dan *Resource-Based View* (RBV) yang menegaskan pentingnya sinergi antara kapasitas internal dan dukungan kelembagaan eksternal dalam mewujudkan keberlanjutan UMKM. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang belum dilaksanakan untuk memperkaya temuan kuantitatif, serta model penelitian yang belum memasukkan variabel lain seperti orientasi pasar, digitalisasi keuangan, atau dukungan teknologi yang berpotensi memperkuat hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan pendekatan wawancara dan menambahkan variabel kontekstual agar dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika keberlanjutan UMKM di daerah.

SARAN

1. Saran Praktis: Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan perlu memperkuat literasi keuangan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan pembiayaan hijau. Implementasi kebijakan keberlanjutan di daerah perlu disederhanakan agar lebih operasional dan mudah diakses oleh pelaku usaha, disertai peningkatan koordinasi lintas instansi. Lembaga perbankan diharapkan memperluas akses dan mengembangkan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan karakteristik UMKM, sekaligus meningkatkan sosialisasi manfaat ekonomi dari praktik usaha ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan asosiasi UMKM perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pembiayaan berkelanjutan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan UMKM di daerah berkembang seperti Sulawesi Barat.
2. Saran Teoritis: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model konseptual dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi lain seperti digitalisasi keuangan, orientasi pasar, dan inovasi hijau yang dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme pembentukan keberlanjutan UMKM. Selain itu, pendekatan mixed method melalui wawancara mendalam dapat digunakan untuk memvalidasi hasil kuantitatif dan menggali aspek perilaku, kebijakan, serta dinamika kelembagaan yang belum terungkap secara statistik. Dengan penguatan pada konteks metodologis dan pengembangan model, penelitian mendatang diharapkan mampu memperluas dasar teoretis dan memperkaya literatur tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis UMKM di daerah berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Terkhusus kepada Kemendiktisaintek atas bantuan dana hibah penelitian yang diberikan kepada penulis.

REFERENSI

Abd El Hamid, F. M., Ahmed, E. H., Basuony, N. A. E. M., & Amer, W. M. (2024). Effect of Massive Online Courses on Improving Nurses' Performance Regarding Infection Prevention Measures. *Zagazig Nursing Journal*, 20(1), 40-60. <https://doi.org/10.21608/znj.2024.335085>

Aghelie, A. (2017). Exploring drivers and barriers to sustainability green business practices within small medium sized enterprises: primary findings. In *International Journal of Business and Economic Development* (Vol. 5). www.ijbed.org

Ali, A., Li, J., Zhang, J., & Chishti, M. Z. (2024). Exploring the impact of green finance and technological innovation on green economic growth: Evidence from emerging market economies. *Sustainable Development*, 32(6), 6392–6407. <https://doi.org/10.1002/sd.3031>

Anisa Salsabila Kemala Fikri, & Nahda, K. (2023). The Effect of Financial Literacy on MSME Performance Through Financial Access and Financial Risk Attitude as a Mediation Variable. *Jurnal Economic Resource*, 6(2), 238–247. <https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.664>

Apia Dewi Agustin, & Muhammad Hanif Ibrahim. (2024). FROM EXCLUSION TO INCLUSION: THE ROLE OF FINANCIAL TECHNOLOGY IN ENHANCING SUSTAINABILITY PERFORMANCE IN INDONESIAN MUSLIM MSMEs. *Journal of Finance, Economics and Business*, 3(2), 122–142. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i2.147>

Appiah-Kubi, E., Koranteng, F. O., Dura, C. C., Mihäilă, A. A., Drigă, I., & Preda, A. (2024). Green financing and sustainability reporting among SMEs: The role of pro-environmental behavior and digitization. *Journal of Cleaner Production*, 478, 143939. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143939>

Ardi Armen, Sulis Yulyani, & Aretha Widi Ailani. (2023). Financial Literacy and Financial Management Proficiency In Micro, Small, and Medium Enterprises. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(3), 373–383. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i3.3001>

Arjawa, I. G. W., Made Pulawan, I., & Ayu Sita Laksmi, P. (2024). The Government's Role in Improving MSME Business Performance in Denpasar City. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(6 (SE-Articles)), 5638–5649. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i6.3534>

Arslan, M., & Kisacik, H. (2017). The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 18–34. <https://doi.org/10.25095/mufad.402214>

Azalia, K., & Muharam, riyani; M. P. I. (2025). Economic and Business Horizon The Impact of Green Finance Initiatives on SME : *Journal of Sustainability and Business Innovation*, 4(4), 375–384. Retrieved from https://www.researchgate.net/figure/Article-analysis-of-the-impact-of-green-finance-initiative-on-SMEs_tbl1_395946571

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024, July 9). *Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYwlzI=/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten.html>

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>

Basir, I., Ansari, M. I., & Fitriani, N. (2024). Urgensi sustainability reporting pada pemerintah daerah: sebuah analisis studi wacana. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 805–816. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6481>

Burchi, A., Włodarczyk, B., Szturo, M., & Martelli, D. (2021). The Effects of Financial Literacy on Sustainable Entrepreneurship. *Sustainability*, 13, 5070. <https://doi.org/10.3390/su13095070>

Chaidir, M., Yulianti, G., & Ruslaini, R. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM di Indonesia. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(1), 218–220. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i1.2079>

Fitriani, Putra, Basir

Pembiasaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan UMKM

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *Nucl. Phys.*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>

Donaldson, L. (2001). *The Contingency Theory of Organizations*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452229249>

Dwyanti, D. (2024). The Importance of Financial Literacy in Financial Management in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Applied Management and Business*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.37802/jamb.v5i1.661>

Edward, O. T., Mukti, A. H., Misman, F. N., & Sastrodiharjo, I. (2024). Financial literacy and technology adoption for the sustainability of micro small and medium enterprises: evidence from Indonesia and Malaysia MSME'S. *Insight Journal (IJ)*, 11, 248–265.

Elkington, J. (1997). The triple bottom line. *Environmental Management: Readings and Cases*, 2(1997), 49–66.

Elliott, L., & Setyowati, A. B. (2020). TOWARD A SOCIALLY JUST TRANSITION TO LOW CARBON DEVELOPMENT: THE CASE OF INDONESIA. *Asian Affairs*, 51(4), 875–894. <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1835000>

Hadi, D. P., Riyanto, Wahyuhastuti, N., Wuryandini, E., & Putra, F. D. (2024). Sustainability Strategy in the Development of Msmes By Bank Indonesia in Increasing Economic Growth by Using Green Economic Policy As An Intervening Variable. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(12), e011090. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-241>

Haktanır Aktaş, E., & Kahraman, C. (2024). State-of-the-art literature review on green finance with tabular-graphical and network analyses. *Journal of Turkish Operations Management*, 8(1), 120–139. <https://doi.org/10.56554/jtom.1362603>

Ilahi, M., Nazeer, Z., & Rani, S. (2024). Green Finance Adoption and Financial Sustainability of SMEs: The Mediating Role of Green Investment Decision – Making and the Moderating Role of Financial Literacy. *Journal of Social Signs Review*, 2(4), 324–332. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16993525>

Irawati, Rahmayanti Rivai, D., & Fitriani, N. (2024). Revealing Regional Economic Potential Efforts to Increase the Development of Sharia-Based Leading MSMEs in Majene Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI) ISSN*, 14(2), 343–350. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>

Jeandry, G., & Malik, M. C. P. (2024). Financial Literacy and MSME Sustainability : From Basic Knowledge to Savings , Credit , Investment , and Insurance. *International Journal of Economics, Business, and Innovation Research (IJEBIR)*, 03(05), 1491–1505.

Judijanto, L., Supriadi, A., & Lesmana, T. (2024). The Effect of Debt Management, Budgeting Policy, and Green Investment on Financial Growth of Information Technology Companies in West Java. In *West Science Social and Humanities Studies* (Vol. 02, Issue 09). <https://pdfs.semanticscholar.org/2b05/e157e75b803f0f97adf350da01c08d5602fe.pdf>

Kristiawati, E., Mustaruddin, & Afifah, N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Dukungan Pemerintah Terhadap Keberlanjutan UMKM : Analisis Mediasi Orientasi Pemasaran. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(4), 735–744. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i4.1242>

Kumar, L., Nadeem, F., Sloan, M., Restle-Steinert, J., Deitch, M. J., Ali Naqvi, S., Kumar, A., & Sassanelli, C. (2022). Fostering Green Finance for Sustainable Development: A Focus on Textile and Leather Small Medium Enterprises in Pakistan. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su141911908>

Kusumawardhani, R., Ningrum, N. K., & Rinofah, R. (2023). Investigating digital financial literacy and its impact on SMEs' performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(12), 5. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9298401>

Fitriani, Putra, Basir

Pembiasaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan
UMKM

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>

Meilandri, D., Saputri, N. A., Ridwan, M., Hardiwinoto, H., Kristanto, E., & Sudarmanto, E. (2025). The Role of Green Innovation. Cost Efficiency, and Government Incentives on the Financial Sustainability of Eco-Conscious MSMEs. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1286-1296. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1185>

Molina-García, A., Galache-Laza, M. T., González-García, V., & Diéguez-Soto, J. (2025). Financial literacy and environmental sustainability in SMEs: process innovation as an association mechanism. *Eurasian Business Review*. <https://doi.org/10.1007/s40821-025-00289-8>

OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021. (2021). OECD. <https://doi.org/10.1787/97a5bbfe-en>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA VERSI 2 Februari 2025*. www.ojk.go.id

Patil, S. J. (2024). Mastering Money: An Introduction to Financial Literacy. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(6), 1–5. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.31067>

Peña, D. M. (2020). Factors Influencing Green Financing Availment Among Small and Medium-Sized Enterprises. *Journal of Business, Accountancy, and Hospitality Studies*, 1, 119–141. <https://doi.org/10.70228/CBJ2022046>

Raji, D. (2024). Sustainable Finance in Action: Exploring Green Loans in Promoting Environmental Responsibility. *Kristu Jayanti Journal of Management Sciences (KJMS)*, 2(June), 14–25. <https://doi.org/10.59176/kjms.v2i1.2348>

Rama, N., Pariharb, D. S., Vermac, S., Lohanid, J. K., & Panded, R. (2025). Financial Literacy and Inclusion among Unorganised Sector Workers: A Case Study of Nainital Town, Uttarakhand. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(6), 4581–4591. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0625.2169>

Ramadhona, D., Syafri, W., Maryani, D., & Achmad, M. (2023). Government Support and Policy Design to Improve MSME's Performance. *Journal of Social Research*, 2(7), 2157–2172. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1008>

Renjati, R., & Faisal, F. (2024). Development of green SMEs: Integrating green entrepreneurship and innovation for environmental sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1419(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1419/1/012055>

Rinaldo, P. V. A. D. (2024). Enhancing Financial Literacy to Promote Sustainability in MSMEs. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 14(1 SE-Articles), 95–104. <https://doi.org/10.34010/jika.v14i1.14393>

Roy, N. (2025). Green Finance—The Environment Friendly Finance. *International Journal Of Scientific Research In Engineering And Management*, 09, 1–9. <https://doi.org/10.55041/IJSREM51742>

Rudy C Tarumingkeng. (2024). *Resource Based-View (RBV)*. RUDYCT e-PRESS.

Rusmanah, E., Riswanti, D. M., & Fadhillah, H. (2024). Identification of Environmental, Social, and Governance Implementation in Micro, Small, and Medium Enterprises. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 03(12). <https://doi.org/10.58806/ijsshrmr.2024.v3i12n04>

Sumastuti, E., Nariyanti, E., & Indriasari, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 2(2), 97-104. <https://dx.doi.org/10.47729/indicators.v2i2.67>

Uianti, N. P. L., & Purbadharma, I. B. P. (2023). The Effect Of Financial Inclusion And Financial Literacy On The Performance And Sustainability Of MSMEs In Gianyar District. *EURASIA: Economics & Business*, 73(7), 10–21. <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2023-07.02>

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm Birger. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180. <https://doi.org/10.4135/9781071923979>

Fitriani, Putra, Basir

Pembiayaan Hijau sebagai Moderator: Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan UMKM

Xu, A., Dai, Y., Hu, Z., & Qiu, K. (2025). Can green finance policy promote inclusive green growth? - Based on the quasi-natural experiment of China's green finance reform and innovation pilot zone. *International Review of Economics & Finance*, 100, 104090. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104090>

Zhang, S., & Cheung, A. (Waikong). (2025). Are green finance and inclusive finance complements or substitutes for MSMEs? – Evidence from China's green finance reform and innovation pilot zone. *Energy Economics*, 141, 108125. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108125>